

SKRIPSI



**EVALUASI KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA UNTUK TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN
BEKASI**

Disusun Oleh:

Nama : Sofyan Hanafi
NPM : 2112011043
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024



**EVALUASI KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA UNTUK TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN
BEKASI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

**NAMA : Sofyan Hanafi
NPM : 2112011043
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

NAMA : Sofyan Hanafi
NPM : 2112011043
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul : Evaluasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja Untuk
Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Bekasi

Tugas Akhir telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 24 Oktober 2024

Pembimbing,



(Nila Kurniawati S.AP, M.AP)

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tanggal, 31 Oktober 2024

Ketua merangkap anggota,



(Handwritten signature)
(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA)

Sekretaris merangkap anggota,

(Handwritten signature)

(Retnayu Prasetyanti S.AP., M.AP)

Anggota,

(Handwritten signature)

(Nila Kurniawati S.AP., M.AP)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sofyan Hanafi
NPM : 2112011043
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul " Evaluasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja Untuk Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Bekasi" merupakan hasil karya saya sendiri dan terbukti keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiat terhadap karya tulisan orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang sadar dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 24 Oktober 2024

Peneliti,



Sofyan Hanafi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja Untuk Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bekasi”** sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

Sebuah kapal takkan mencapai pelabuhan tanpa dukungan dari setiap elemen di sekitarnya. Dengan badai yang riuh, ombak yang kuat, angin yang berhembus, dan lautan yang sesekali tenang, seorang nakhoda akhirnya berhasil membawa kapalnya ke tujuan. Nakhoda itu tak lagi sama seperti sebelumnya, dan dengan rasa syukur, ia ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Adik saya dan adik saya dan seluruh keluarga besar yang doanya menguatkan setiap langkah, menembus langit dengan penuh cinta dan harapan.
2. Ibu Nila Kurniawati S.AP, M.AP yang telah membimbing dan bantu menentukan arah untuk mencapai tujuan
3. Pak Dr. Edy Sutrisno M.Si yang selalu menjadi pendorong semangat, menguatkan tekad untuk terus belajar dan berorganisasi dengan penuh dedikasi.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu dengan penuh ikhlas, keindahan dan membuka cakrawala pemahaman yang berharga.
5. Bapak dan Ibu Staff Akademik dan Admin Program Studi yang telah memberikan dukungan administratif serta bimbingan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini
6. Keluarga PRISMA dan Rumah Abah yang senantiasa menjadi tempat bersandar di tengah badai, memberi ruang sejenak untuk rehat dan menguatkan kembali.
7. Anggita Dian Pusparini sang navigator yang selalu membantu menemukan arah saat langkah tersesat dan pikiran buntu.

8. Zata Yumni, Syakhila Keisha, Raniah Nurjanah dan Cinta Anandya yang dukungannya datang seperti angin sejuk, menyejukkan hati dalam segala keadaan.
9. Kabinet Abhinavaka dan Kementerian Pendidikan yang menjadi tempat tujuan sekaligus pembuktian diri, rumah kedua yang penuh tantangan dan pencapaian.
10. Keluarga omah yang hangatnya selalu dirasakan dalam dinginnya hujan.
11. Alya Amalia, Emily Murthie yang mendukung dan menemani penuh kehangatan di Student Center, menciptakan cerita-cerita tak terlupakan.
12. Astri Aisyah Darma, Dila Alifaah Ekawati, Sayid Muhammad Al-Maliki dan Muhammad Hilmi Atianasurur yang selalu menemani dalam jauh.
13. Teman-teman kelas Kebijakan Publik yang telah menemani dan kebersamai dalam menempuh perjalanan akademik.
14. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang telah memberikan bimbingan serta dukungan dalam setiap proses belajar di lapangan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, peneliti dengan sepenuh hati terbuka dan siap menerima kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas karya ini. Di penghujung kata, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses penulisan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi No. 9 Tahun 2019. Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran meskipun Kabupaten Bekasi memiliki banyak kawasan industri yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesempatan kerja lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dan ketimpangan dengan tenaga kerja dari luar daerah. Selain itu, kurangnya pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal serta ketidakjelasan persentase penyerapan tenaga kerja lokal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen serta penguatan pelatihan bagi tenaga kerja lokal guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, kesempatan kerja, tenaga kerja lokal, Kabupaten Bekasi, ketenagakerjaan

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

This study aims to evaluate the policy on expanding employment opportunities for local workers in Bekasi Regency, based on Bekasi Regent Regulation No. 9 of 2019. The main issue addressed is the high unemployment rate, despite Bekasi Regency having numerous industrial areas with the potential to absorb local workers. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach to understand the effectiveness of the policy in increasing local employment opportunities. The results show that although the policy has been implemented, there are still various challenges, such as the low absorption of local labor and disparities with workers from outside the region. Additionally, the lack of training and skills for local workers, as well as the unclear percentage of local workforce absorption, remain significant obstacles in the policy's execution. This study recommends increasing transparency in the recruitment process and strengthening training for local workers to enhance their competitiveness in the labor market.

Keywords: *policy evaluation, employment opportunities, local workforce, Bekasi Regency, labor*

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	iii
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori	12
1. Tinjauan Kebijakan.....	12
2. Tinjauan Teori	14
A. Administrasi Publik.....	14
B. Administrasi Pembangunan	16
C. Kebijakan Publik.....	20
D. Evaluasi Kebijakan.....	23
E. Ketenagakerjaan.....	27
F. Kesempatan Kerja.....	29
G. Teori Pengangguran	30
B. Konsep Kunci	32
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian.....	35

B.	Teknik Pengumpulan Data	37
C.	Instrumen Penelitian	42
D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		47
A.	Gambaran Umum	47
B.	Penyajian Data	56
C.	Pembahasan.....	102
D.	Sintesis Pemecahan Masalah	113
BAB V PENUTUP.....		121
A.	Kesimpulan.....	121
B.	Saran	123
REFERENSI.....		125
LAMPIRAN.....		129



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sektor Dominan di Kabupaten Bekasi	3
Tabel 1. 2 Data Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran.....	4
Tabel 1. 3 Data Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bekasi	7
Tabel 3. 1 Daftar Key Informant	39
Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi	48
Tabel 4. 2 Data Karyawan PT Nippon Stell Chemical Indonesia.....	83
Tabel 4. 3 Kendala dalam Penerapan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi	112



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lima Jenjang Administrasi Publik	15
Gambar 2. 2 Tahapan Tahapan Kebijakan Publik	22
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir.....	34
Gambar 4. 1 Peta Admististrasi Wilayah Kabupaten Bekasi	48
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	52
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	52
Gambar 4. 4 Instagram Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan	66



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari berbagai fenomena sosial yang menyertai proses pembangunan. Titik pusat dari Pembangunan ini adalah sumber daya manusia termasuk tenaga kerja. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan merupakan sebuah aspek penting dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, ketenagakerjaan secara intrinsik berhubungan dengan kemajuan perekonomian di Indonesia. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi dapat mempercepat langkah Pembangunan bangsa, dengan memosisikan Indonesia untuk dapat bersaing secara kompetitif pada kancah global (Muhyiddin et al., 2024).

Secara umum, ketenagakerjaan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam rangka menghasilkan sebuah barang dan jasa. Dalam konteks ini, tenaga kerja tidak hanya dilihat sebagai sumber daya manusia yang mendukung jalannya pertumbuhan ekonomi negara akan tetapi juga sebagai entitas yang memiliki hak serta kesejahteraan yang harus dilindungi oleh negara. Pemerintah memiliki peran penting serta tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2) Menyebutkan “*Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari tenaga kerja, harus sejalan dengan amanat konstitusi tersebut. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

Namun isu ketenagakerjaan juga menjadi isu sentral yang terus selalu menjadi permasalahan Indonesia menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup menampung angkatan kerja yang tahun demi tahun terus bertambah, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angkatan kerja nasional pada Februari 2024 sebanyak 149,38 Juta orang, naik 2,76 Juta orang dibanding february 2023, serta menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (2024), Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 7,20 juta orang atau 4,82% dari total angkatan kerja data tersebut masih cukup jauh dibanding dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 yang berada di kisaran 3,6-4,3 persen.

Data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan angkatan kerja nasional tidak diiringi dengan kemampuan pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja, sehingga mencerminkan adanya gap permasalahan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah kesempatan kerja, dan pada akhirnya masih tinggi nya angka pengangguran, oleh karena itu pengangguran tetap menjadi isu yang terus menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada di pulau jawa, yang terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan dan 180 desa dengan luas wilayah sebesar 373,70 Km², dengan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 3.2 juta jiwa per 2023 dengan kepadatan penduduk mencapai 2.451 jiwa per Km². Kabupaten Bekasi Merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota Jakarta, memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia dan merupakan daerah yang memiliki perkembangan industri yang sangat pesat dan sebagai salah satu tujuan investor dari berbagai perusahaan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan internasional, pesatnya pembangunan industri. berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi, saat ini lebih dari 7.500 pabrik, naik yang berskala nasional maupun multinasional yang beroperasi di wilayah ini dan pabrik yang berdiri serta

tersebar ke 11 kawasan industri yang berada di Kabupaten Bekasi, oleh karena itu Kabupaten Bekasi menjadi salah satu Kawasan industri terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Menurut Open Data Kabupaten Bekasi 2023 sektor industri di Kabupaten Bekasi terbukti dominan selama jenjang 2019-2023 berikut merupakan data distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 1. 1 Data Sektor Dominan di Kabupaten Bekasi

Tahun	Kehutanan & Perikanan	Industri	Mobil & Sepeda Motor	Konstruksi	Transportasi & Pergudangan
2019	1,20 %	77.74 %	5.64 %	6. 76 %	1.26%
2020	1,28 %	77.20 %	5.70 %	6. 49 %	1.30 %
2021	1.28 %	77.21 %	5.73 %	6.35 %	1.33 %
2022	1.26 %	77. 37 %	5. 67 %	6. 20 %	1.35 %
2023	1.25 %	77. 46 %	5.61 %	6.06 %	1.45 %

Sumber: Open Data Kabupaten Bekasi 2024, Badan Pusat Statistik

Hal diatas menunjukkan bahwa sektor industry mendominasi Produk Domestik Regional Bruto selama perioede 2019 hingga 2023. Meskipun memiliki berbagai kawasan industri yang menjadi dasar sebuah ekonomi yang kuat dan industri sebagai sektor yang mendominasi, Kabupaten Bekasi juga menghadapi tantangan serupa yaitu terkait dengan ketenagakerjaan. Dengan melihat jumlah pabrik yang terdapat di Kabupaten Bekasi yang jumlah nya dapat dikatakan sangat banyak, akan tetapi yang hal tersebut diharapkan akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Namun, penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala salah satunya pengangguran yang masih menjadi isu yang signifikan di Kabupaten Bekasi (Ervanto et al., 2022). Berikut adalah tabel tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi.

Tabel 1. 2 Data Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran

Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran
2019	1.778.133	9.00%
2020	1.840.666	11.54%
2021	1.953.408	10.09%
2022	2.006.507	10.31%
2023	1.592.879	8.87%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel diatas menunjukkan tingkat perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebesar 1.778.133 dan tingkat pengangguran sebesar 9.00%, 2020 jumlah angkatan kerja sebesar 1.840.666 dan karena faktor pandemi covid 19 tingkat pengangguran sebesar 11.54%, pada 2021 jumlah angkatan kerja sebesar 1.952.408 dan tingkat pengangguran turun keangka 10.09%, pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja sebesar 2.006.507 dan tingkat pengangguran naik kembali menyentuh 10.31 % dan tahun 2023 jumlah angkatan kerja sebesar 1.996.000 dan tingkat pengangguran turun keangka 8.87%. Adanya tingkat pengangguran yang cenderung fluktuatif dari lima tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan yaitu pada tahun 2020-2021 Pandemi Covid 19 atau wabah virus korona banyak perusahaan ataupun pengusaha yang melakukan *overmacht* dengan secara sepihak dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK (Dewata & Santoso, 2022). Dengan adanya wabah Covid 19 angka pengangguran membengkak tidak hanya di Kabupaten Bekasi tingkat pengangguran secara nasional pun turut naik pada tahun 2020. Pada tahun 2023 angka pengangguran pun beranjak naik ke angka 8.87 % dikarenakan menurut PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan, penurunan angka pengangguran dihasilkan dari peningkatan jumlah wirausahawan. Dalam dua tahun terakhir, tumbuh 7.000

UMKM baru yang tidak hanya memberikan sinyal positif ekonomi mikro akan tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal (Syah, 2023). Namun dalam kenyataannya trend tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target tingkat pengangguran terbuka nasional yang berada di kisaran 3,6-4,3 persen dan jika dibandingkan pula dengan RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022 pada dikisaran 5,55%, dengan melihat target yang ingin dicapai pada dokumen perencanaan tersebut raihan angka tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi masih jauh dari target yang sudah direncanakan.

Dengan jumlah tingkat pengangguran pada tabel di atas dan dengan melihat target tingkat pengangguran nasional dan daerah dapat dikatakan Kabupaten Bekasi memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi meskipun terdapat tren penurunan beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi permasalahan terkait ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bekasi No 9 Tahun 2019 tentang perluasan kesempatan kerja, namun jika dilihat dari data tingkat pengangguran diatas, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi dari tahun 2019-2023 pertumbuhan tingkat pengangguran masih cenderung fluktuatif. Perluasan kesempatan kerja menurut Peraturan Bupati Bekasi No.9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebuah upaya yang dilakukan guna menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang telah tersedia. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bekasi juga mengatur didalam peraturan tersebut terkait perluasan kesempatan kerja setiap sektor dibagi menjadi dua faktor dengan meliputi, perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan. Dengan munculnya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Meskipun kebijakan perluasan kesempatan kerja telah diimplementasikan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan di lapangan. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Bupati Bekasi No.9 Tahun 2019, kenyataannya masih terdapat banyak permasalahan yang muncul selama proses penerapan implementasi kebijakan ini, salah satu masalah utama yang muncul adalah terdapat ketimpangan dalam penerimaan tenaga kerja antara pekerja lokal dan pekerja dari luar daerah, yang saat ini masih terus terjadi. Selain itu terdapat laporan terkait praktik curang dari oknum penyalur kerja yang memanfaatkan situasi yang ada di lapangan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, dengan memanipulasi proses penerimaan tenaga kerja baru (Mohammad Arfan Fauzi, 2023).

Meskipun telah terdapat peraturan yang khusus dirancang untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah belum cukup persuasif dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja. Masih banyak terdapat perusahaan yang sering kali tidak taat terhadap peraturan yang ada, yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dampak sosial dan ekonomi yang negatif bagi masyarakat lokal khususnya. Lebih lanjut, rendahnya proses pengembangan keterampilan serta minimnya pelatihan bagi para calon tenaga kerja lokal yang seharusnya telah dibekali sebelum terjun ke dunia kerja dapat memperburuk situasi yang ada. Berikut adalah data terkait tingkat pendidikan di Kabupaten Bekasi berdasarkan "Kabupaten Bekasi dalam Angka 2024," yang mempengaruhi tingkat keterampilan tenaga kerja.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Tabel 1. 3 Data Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bekasi

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Total Angkatan Kerja	TPAK (%)
≤ SMP	470.073	51.279	521.352	52,16
SMA	725.951	80.569	806.520	71,53
Perguruan Tinggi	255.598	9.409	265.007	81,92
Total	1.451.622	141.257	1.592.879	65,00

Sumber: Kabupaten Bekasi dalam Angka 2024

Data pendidikan di Kabupaten Bekasi menunjukkan mayoritas angkatan kerja adalah lulusan SMA (71,53%) yang menempati pekerjaan dengan keterampilan rendah karena keterbatasan keahlian teknis. Lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tertinggi (81,92%) dan pengangguran yang rendah, mencerminkan daya saing yang lebih tinggi. Sebaliknya, lulusan ≤ SMP menghadapi TPAK rendah (52,16%) dan pengangguran tinggi, yang menunjukkan kesenjangan keterampilan, hal tersebut mengakibatkan Terdapat Banyak tenaga kerja lokal yang masih belum terserap ke dalam perusahaan yang tersebar pada 11 kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi yang seharusnya perusahaan tersebut dapat menjadi mitra pemerintah, permasalahan tersebut muncul karena di dalam peraturan tersebut tidak mengatur terkait berapa presentase pekerja lokal dapat diserap di perusahaan tersebut, sehingga terjadi kesalahan persepsi antara perusahaan yang mereka bisa menentukan berapa kuota tenaga kerja lokal yang bisa diserap di perusahaan tersebut.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, telah mendorong Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat strategi baru dalam rangka menyerap lebih banyak calon tenaga kerja lokal ke dalam indsutri yang ada di Kabupaten Bekasi, serta pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pemagangan (Bekasikab go.id

2023.) Namun, meskipun PJ Bupati Bekasi telah mengintruksikan terkait hal-hal tersebut yang sebetulnya belum sepenuhnya efektif, terutama masih terdapat permasalahan khususnya hadirnya oknum penyalur kerja yang mempersulit proses penyerapan tenaga kerja, dengan praktik pungutan liar yang sangat merugikan masyarakat.

Melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap jalanya Peraturan Bupati Bekasi No.9 Tahun 2019 yang telah diimplementasikan di Kabupaten Bekasi. Menurut Anderson yang dikutip dari (Budi, 2014). Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi serta dampak. Dalam artian evaluasi kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu memberi upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan pekerjaan yang tersedia dalam konteks ini fokus terhadap calon tenaga kerja lokal.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup pada evaluasi perluasan kesempatan kerja khususnya terkait tenaga kerja lokal. Diakibatkan masih terdapat permasalahan yang muncul setelah pelaksanaan implementasi peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan cukup tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi yang tidak sebanding dengan jumlah kawasan industri dan jumlah pabrik/perusahaan yang ada. Dengan mempertimbangkan permasalahan atau fenomena yang terkait dengan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa hal ini sangat penting dan perlu untuk dikaji serta diperdalam.

Berkaitan dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja terkait dengan fokus kepada tenaga kerja lokal sudah terdapat penelitian terdahulu yang meneliti terkait hal tersebut, pertama Implementasi Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Oleh PT. MEIJI Rubber Indonesia (Fajarwati & Rahmadila, 2022), penulis Arnia Fajarwati mengungkapkan bahwa implementasi penyerapan tenaga

kerja lokal oleh PT. Meiji Rubber Indonesia menunjukkan bahwa proses ini belum optimal serta tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait perluasan kesempatan kerja. Kurangnya kompetensi, transparansi, serta pengaruh kedekatan dalam rangka perekrutan menjadi hambatan utama. Upaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan juga belum efektif, dikarenakan minimnya partisipasi tenaga kerja lokal.

Kedua Peran Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Yang Meningkat Akibat COVID-19 Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan (Nurhapsari et al., 2021), penulis Nindya Febrina Nurhapsari mengungkapkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Bekasi meningkat drastis selama pandemi COVID-19, kenaikan mengakibatkan kurang lebih dari 200.000 orang menganggur, dipicu oleh pengurangan tenaga kerja serta melemahnya sektor industri, Pemerintah Kabupaten Bekasi merespon dengan mengadakan pelatihan serta pemagangan bersertifikat guna mengurangi pengangguran

Ketiga Upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (Putri, 2017), penulis Destya Amalia Putri` mengungkapkan bahwa solusi yang ditawarkan dinas tenaga kerja adalah mendorong perusahaan untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal, melakukan kerja sama dengan kecamatan serta desa dalam rangka proses rekrutmen pelatihan kerja, revitalisasi Balai Latihan Kerja, serta meningkatkan kegiatan wirausaha bagi warga Kabupaten Bekasi.

Namun penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum ada yang membahas terkait evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja khususnya terkait penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi serta perbedaan prespektif antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik mengambil fokus judul terkait, **“Evaluasi Kebijakan**

Perluasan Kesempatan Kerja Untuk Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bekasi” diperlukan untuk mengetahui hasil implementasi peraturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari program ini.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademik atau maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Akademik

Manfaat Akademik artinya penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya atau yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menangani masalah ketenagakerjaan, salah satunya terkait

penyerapan tenaga kerja lokal serta melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika gambaran kepada masyarakat terkait Evaluasi Kebijakan perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**